

**JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG
KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI

Oleh :

**Ilmiyaul Faizah
NIM : C02207037**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2012**



**JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM)
DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN
JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG
KAKI LIMA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

Oleh :

No. KLAS

No. REG

: S.2012/4/110

K
S.2012

ASAL BUKU :

110

TANGGAL :

M

**Ilmiyaul Faizah
NIM. C02207037**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILMIYAUL FAIZAH

NIM : C02207037

Semester : X

Jurusan : Muamalah

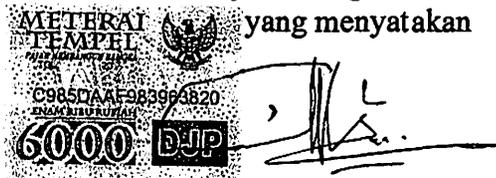
Fakultas : Syariah

Alamat : Dusun Kalanganyar, Desa Sembunganyar, Dukun-Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*JUAL BELI KIOS (MILIK UMUM) DI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KALI LIMA*" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2012

yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
Rp 6000
C985DAAE983964820
DIREKTORAT JENDERAL
6000 DJP

Ilmiyaul Faizah
CO2207037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilmiyaul Faizah (C02207037) ini telah diperiksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 8 Agustus 2012

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdullah', written over a horizontal line.

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqaydhah*.¹

Secara linguistik, Jual beli (**الْبَيْعُ**) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) .hal. 112

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).hal 69.

Adapun menurut qiyas (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.³

Definisi lain dikemukakan ulama malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah, menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).⁴

Pasar Tanjung di kabupaten Jember didirikan pada tahun 1966. merupakan pasar induk terbesar dan menjadi pusat perekonomian oleh masyarakat Jember. Sebelum menjadi pasar Tanjung, pasar ini menjadi pusat informasi dan kondisi negara. Masyarakat Jember berkumpul di halaman untuk mendengarkan siaran-siaran pemerintah. Karena di pasar Tanjung terdapat satu-

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006). hal 365.

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hal 114

هَآئِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي¹¹

Dikabarkan pada kita dari Qutaibah, Dikabarkan pada kita dari Hammad Ibnu Zaid dari Ayyub, dari Yusuf Ibnu Malik , dari Hakim Ibnu Hizam menceritakan: “Rasulullah SAW telah melarang menjual sesuatu yang bukan milikku (tidak ada padaku).”¹²

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Praktek jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember
2. Dampak jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.
4. Peraturan perundang-undangan kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima Nomor 6 Tahun 2008.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kios (milik umum) pasar di pasar Tanjung kabupaten Jember.

¹¹ Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3*, (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah). hal 17

¹² Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006). hal.1301

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang **“Jual Beli Kios (Milik Umum) Pasar Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Menurut Hukum Islam Dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008”**. Yang mana dalam permasalahan kali ini ada pihak yang dimanfaatkan oleh pihak lain namun dalam kenyataannya transaksi tersebut masih berlanjut dikarenakan faktor-faktor lain. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti dengan perspektif hukum Islam dan perda kabupaten Jember terhadap jual beli kios (milik umum) pasar tersebut.

Mengenai masalah jual beli telah dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja berbeda kasus dan permasalahannya yaitu:

Skripsi milik Imam Rofiki pada tahun 1998, yang mengangkat masalah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lancang (Studi Kasus Didesa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro),”** yang dalam penelitian ini Imam Rofiki mengkaji tentang jual beli lancang yakni jual beli milik orang lain tanpa izin dari pemilik. Terjadinya jual beli tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan terjadi secara otomatis yang dilakukan

secara sengaja oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian skripsi diatas itu hukum jual beli lancang secara umum masih tetap tergantung dari izin pemilik barang.¹³

Skripsi milik Ahmad Mujtahid pada tahun 1990, yang berjudul **“Praktek Jual Beli Tanah Milik Dengan Akta Dibawah Tangan Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”** yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang terjadinya cara pelaksanaan akta dibawah tangan yang dilakukan dihadapan kepala desa atau RT/RW, dan akad jual beli tersebut berakhir dengan penyelesaian sistem panjer. Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjer itu termasuk harga pembelian namun jika tidak dilaksanakan oleh pemebeli maka uang panjer sebagian hilang. Namun jika penjual yang mengurungkan maka uang itu dikembalikan lagi. Dan hasil penelitian skripsi ini kedudukan transaksi jual beli tanah hak milik dengan akta dibawah tangan menurut UUPA adalah sah tapi tidak kuat, sedangkan menurut hukum Islam sah.¹⁴

Skripsi milik Titik Khurrotin pada tahun 2008, yang berjudul **“Mekanisme Sewa Menyewa “Tanah Gusuran” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan)”**.

¹³ Imam Rofiki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lancang (Studi Kasus Didesa Samberan Kec. Kanor Kab. Bojonegoro)*, (skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), hal.78.

¹⁴ Ahmad Mujatahid, *Praktek Jual Beli Tanah Milik Dengan Akta Dibawah Tangan Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990), hal.82.

Yang membahas tentang praktek sewa- menyewa tanah gusuran yang dilakukan oleh para petani karena adanya kesempatan bagi warga desa yang merasa sebagai pemilik tanah sebelum adanya pencabutan hak milik atas tanah pada tahun 1993, dalam akad tersebut, mu`jir menyewakan tanah gusuran tanpa ijin dari pemilik dan musta`jir didalam pelaksanaan pembayaran sewa tidak sesuai dengan kesepakatan karena hak musta`jir melakukan pengurangan nilai harga sewa dalam setiap pembayarannya. Hasil dari skripsi ini menurut hukum Islam batal, karena obyek dalam peresewaan tersebut adalah bukan hak milik.¹⁵

Skripsi milik H. Ahmad Subhan pada tahun 1996, yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktek Perantara Dalam Jual Beli Tanah Dikecamatan Menganti Kabupaten Gresik”** yang membahas tentang perjanjian jual jasa yaitu perajakan antara pihak perantara diberi kuasa oleh penjual, perantara mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan keperantaraannya yakni mulai dari mencari pembeli sampai selesainya transaksi jual beli tanah. Demikian sebaliknya. Hasil dari skripsi ini menurut hukum Islam ada sebagian perantara yang melakukan

¹⁵ Titik khurrotin, *Mekanisme Sewa Menyewa “Tanah Gusuran” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan)*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), hal.62.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan menjawab pertanyaan tersebut.²³ Hal ini dilakukan oleh lima pihak yang terkait dalam transaksi jual beli kios (milik umum) pasar di Pasar Tanjung.

c. Telaah terhadap buku-buku yang berhubungan dengan jual beli.

6. Teknik Mengolah Data

Teknik mengolah data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *editing* dan *organizing*.

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kelengkapan, dan sesuai data. Tehnik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.²⁴

b. *Organizing*

Yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi penelitian* ,(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009). hal. 153

c. Cara ijab dan qabul

Dan untuk memudahkan bertransaksi jual beli antara penjual dan pembeli maka perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami antara keduanya. Adapun bahasa yang sering digunakan dipasar Tanjung adalah bahasa Jawa meskipun tidak sedikit pula orang yang berasal dari kalangan yang berbahasa Madura.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa seorang penjual apabila menawarkan dagangannya dengan sikap yang ramah, sopan, dan baik, maka pembeli menilai penjual tersebut adalah orang yang baik dan jujur dalam berjualan. Sedangkan sebaliknya apabila penjual menawarkan dengan sikap yang tidak Ramah dan tutur katanya kasar, maka pembeli pun menilai penjual tersebut tidak jujur. Jadi, sikap yang demikian sangatlah mempengaruhi dalam mengumpulkan atau memperoleh pelanggan.

ditetapkan oleh Bupati. Setiap PKL memperoleh satu kali izin dan bisa diperpanjang, akan tetapi izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, dan izin tidak dipungut biaya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Bab II pasal 2 Tentang Lokasi tempat melakukan kegiatan usaha menjelaskan bahwa, setiap PKL melakukan kegiatan usaha pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati. Seperti:

- a. Ketertiban, keamanan, kebersihan
- b. Jam buka dan jam tutup

Sedangkan jual beli kios pasar yang ada di pasar Tanjung adalah penjual tidak meminta izin kepada kepala daerah. Akan tetapi hanya pihak pertama yang awalnya menyewa kios tersebut, kemudian di salahgunakan yakni dengan cara di perjualbelikan.

Dalam praktek pelaksanaannya, jual beli kios yang ada di pasar Tanjung menyalahi peraturan karena dalam perjanjian sewa-menyewa kios pasar menerangkan kalau setiap PKL tidak boleh memindahtangankan izin pada siapapun dan dalam bentuk apapun

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas tentang PKL yang ada di pasar tradisional Tanjung, maka jual beli kios pasar tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh di atas dengan judul “Jual Beli Kios (Milik Umum) Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diskripsi tentang jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah pedagang yang merupakan seorang penyewa kios pasar telah memperjualbelikan kios pasar dan semua barang dagangannya tersebut kepada seorang pembeli yang ingin melakukan kegiatan usaha di pasar. Yang mana tempat/kios tersebut barang sewa yang bukan milik sempurna pedagang tersebut, akan tetapi milik pemerintah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli ini tergolong jual beli yang batal karena status kios (barang) tersebut adalah barang sewa, yang seharusnya diambil manfaatnya dan. Akan tetapi kios milik umum (pemerintah) yang disewakan kepada PKL tersebut malah diperjualbelikan dengan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh di atas dengan judul “Jual Beli Kios (Milik Umum) Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diskripsi tentang jual beli kios (milik umum) di Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah pedagang yang merupakan seorang penyewa kios pasar telah memperjualbelikan kios pasar dan semua barang dagangannya tersebut kepada seorang pembeli yang ingin melakukan kegiatan usaha di pasar. Yang mana tempat/kios tersebut barang sewa yang bukan milik sempurna pedagang tersebut, akan tetapi milik pemerintah.
2. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli ini tergolong jual beli yang batal karena status kios (barang) tersebut adalah barang sewa, yang seharusnya diambil manfaatnya dan. Akan tetapi kios milik umum (pemerintah) yang

disewakan kepada PKL tersebut malah diperjualbelikan dengan memberikan syarat untuk menjual barang dagangan tertentu dan batasan waktu kepemilikan. Sedangkan dalam tinjauan Perda kabupaten Jember No.6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), praktek jual beli yang dilakukan antara penjual (PKL) dengan pembeli kios (milik umum) di Pasar Tanjung kabupaten Jember tidak diperbolehkan, karena dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa kios pasar telah dijelaskan bahwa kios pasar tidak boleh di pindahtangankan karena kios pasar adalah milik pemerintah. Akan tetapi hal itu dilakukan oleh beberapa PKL di pasar Tanjung kabupaten Jember.

B. Saran-Saran

Saran untuk pedagang pasar Tanjung agar lebih memperhatikan dan mentaati peraturan pasar serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam. Dan untuk pihak-pihak pengelola pasar Tanjung agar lebih ketat dalam memberlakukan dan lebih memperhatikan para pedagang pasar.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dan penulis semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

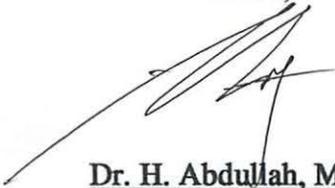
Akhirnya penulis berdo'a selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah SWT, serta tidak lepas dari lindungan-Nya. Amin ya Robbal
Alamiin...

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **ILMIYAUL FAIZAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

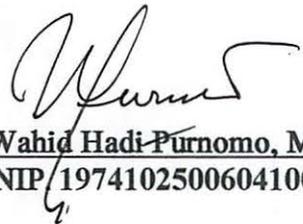
Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr. H. Abdullah, M. Ag.
NIP. 196309041992031002

Sekretaris,



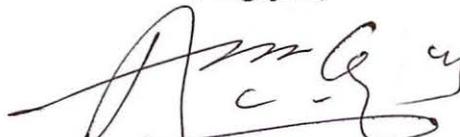
Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 19741025006041002

Penguji I,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Dr. Abdul Kholiq Syafaat, MA
NIP. 197106052008011026

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M. Ag.
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 25 September 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002